

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cangara, Hafied. 2014. Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Ed.Revisi Cet.2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Demartoto, Argyo, 2009, Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Indardi. 2016. Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Unpad Press.
- Kartasmita, G. 1996. Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan yang Berakar Kerakyatan. Jakarta: BPPN.
- Maryunani. 2008. Pembangunan Bumdes dan Pemerdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nurhidayati, Sri Endah. Community Based Tourism (CBT) sebagai Pendekatan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Tugas Akhir D3, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Ndraha, Talizuduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Natori, M. (2001). A Guide Book for Tourism-Based Community Development. Yokohama: Asia Pacific Tourism Exchange Center.
- Sunaryo, B. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.
- Thesesia, Aprillia, et al. 2015. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Andayani, Anak Agung Istri, Edhi Martono & Muhamad Muhamad. 2017. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi di Desa Wisata Panglipuran Bali)” dalam Jurnal Ketahanan Nasional. Vol. 23, No. 1, (hlm. 1-16). Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Atmoko, T. Prasetyo Hadi. 2014. "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman" dalam Jurnal Media Wisata. Vol. 12, No. 2, (hlm. 146-154). Yogyakarta: Akademi Pariwisata Yogyakarta.
- Darto. 2017. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Cijulung Kabupaten Pengandaran Provinsi Jawa Barat" dalam Majalah Ilmiah UNIKOM. Vol. 15, No. 1, (hlm. 61). Bandung: Universitas Padjajaran.
- Dewi, Made Heny Urmila. 2013. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwuh Tabanan, Bali" dalam Jurnal Sosial dan Humaniora Kawistara. Vol 3, No. 2, (hlm. 117-226). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hanuranto, A.T. (2011). Peningkatan akses dan kompetensi teleinformatika (ICT) bagi petani dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian nasional. Prosiding. Seminar Nasional Informatika Pertanian 2011. Akselerasi pembangunan informatika pertanian dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan petani 2011. Himpunan Informatika Pertanian. (h.1-5). Universitas Padjadjaran 21-22 Oktober 2011, Bandung, Indonesia.
- Purnamasari, Andi Maya. 2011. "Pengembangan Masyarakat untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan" dalam Jurnal Perencanaan Wilayah Kota. Vol. 22, No. 1, (hlm. 49-64). Jakarta Selatan: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Web

- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. 2017. <https://dinporapar.purbalinggakab.go.id/>
Diakses pada 27 April 2018.
- Ispranoto, Tri. 2017. Mendes: Tahun Depan Alokasi Dana Naik, Tiap Desa Bisa Dapat Rp 2 M. <https://news.detik.com/berita/d-3487085/mendes-tahun-depan-alokasi-dana-naik-tiap-des-a-bisa-dapat-rp-2-m> dalam Detiknews. Diakses pada 27 April 2018.
- Widiyatno, Eko. 2016. Percepatan Pembangunan Perdesaan di Purbalingga Dapat Prioritas. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/12/29/oiy83f291-percepatan-pembangunan-perdesaan-di-purbalingga-dapat-prioritas> dalam Republika. Diakses pada 27 April 2018.

Dokumen

Peraturan Daerah No 11 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Peraturan Daerah No 11 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang BUMDes.

Undang Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang Undang No 22 Tahun 1999 Pasal 107 ayat 1 tentang PAD.

Undang Undang No 32 Tahun 2004 pasal 213 ayat 3 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1ayat 12 tentang Desa.

